
Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

**Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia**



PERAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL

SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 harus diwujudkan melalui proses demokratisasi, pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh pemerintah bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional. Krisis ekonomi telah menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang diukur dengan *human development index* dari peringkat 104 pada saat sebelum krisis ekonomi menjadi peringkat 112 (dari 175 negara yang disurvei) pada tahun 2003.

*) Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional I GARANSI ,
Grand Hyatt Regency Hotel , 7 Januari 2005 di Surabaya , Jawa Timur

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) menempatkan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional periode tahun 2005 – 2009, dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan lain-lain. Adapun sasaran pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu antara lain:

- 1)** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar 7,6%, dari 4,1% pada tahun 2003.
- 2)** Meningkatnya kesempatan kerja yang ditandai oleh turunnya angka pengangguran terbuka menjadi 5,1% pada tahun 2009, dari 10,1% pada tahun 2003.
- 3)** Meningkatnya pendapatan per kapita menjadi USD 1.731 pada tahun 2009, dari USD 968 pada tahun 2003.
- 4)** Membaiknya perekonomian rakyat yang ditandai turunnya angka kemiskinan dari 17,4% pada tahun 2003 menjadi sekitar 8,2% pada tahun 2009,
- 5)** Membaiknya stabilitas perekonomian yang ditandai oleh laju inflasi yang rendah dan terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil, dan suku bunga SBI yang menurun diikuti secara proporsional oleh suku bunga pinjaman sehingga mendorong sektor riil untuk bergerak, dan lain-lain.

Sasaran pembangunan ekonomi di atas hanya dapat dicapai dengan adanya sinergi kebijakan dan program pembangunan ekonomi lintas sektoral, terutama perlu adanya sinergi program pembangunan antar instansi pemerintah, serta sinergi pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Sasaran pembangunan di atas hanya dapat dicapai jika KUMKM (koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah) dijadikan sebagai motor inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat 99,9% pelaku usaha adalah KUMKM, yang mampu memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, menyediakan 43,8% kebutuhan barang dan jasa nasional, serta memberikan kontribusi dalam pembentukan PDB nasional sebesar 56,72%.

PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.

Perekonomian nasional jika diukur dengan PDB telah pulih dari krisis ekonomi pada akhir tahun 2003. Secara umum peran usaha mikro dan kecil dalam PDB mengalami kenaikan dibanding sebelum krisis, bersamaan dengan merosotnya usaha menengah dan besar terutama pada puncak krisis ekonomi tahun 1998 dan 1999, namun kemudian tergeser kembali oleh usaha besar. Usaha kecil telah pulih dari krisis pada tahun 2001, dan usaha besar baru pulih dari krisis pada tahun 2003, sedang untuk usaha menengah diperkirakan akan pulih pada tahun 2004 ini. Krisis ekonomi mengakibatkan Indonesia tertinggal 7 tahun dibandingkan negara lain dalam membangun daya saing perekonomian nasionalnya.

Tabel 1
Perbandingan Komposisi PDB Menurut Skala Usaha Pada Tahun 1997 dan 2003
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Milyar Rupiah)

No	Skala Usaha	1997	2003	Pertumbuhan
1	Usaha Mikro dan Kecil	171.048 (40,45)	183.125 (41,11)	+ 7,06%
2	Usaha Menengah	78.524 (17,41)	75.975 (15,61)	- 3,25%
3	Usaha Besar	183.673 (42,17)	185.352 (43,28)	+ 0,91%
<i>Jumlah PDB</i>		433.245 (100)	444.453 (100)	+ 2,59%

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (beberapa tahun)

Tabel 2.
Rata-rata Struktur PDB Menurut Skala Usaha Tahun 2000 – 2003

LAPANGAN USAHA	Rata-rata 2000-2003			Struktur
	UK	UM	UB	
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	85,74	9,09	5,17	16,89
2. Pertambangan dan Penggalian	6,73	2,96	90,30	12,20
3. Industri Pengolahan	15,14	12,98	71,89	25,10
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	6,80	92,68	1,73
5. Bangunan	43,88	22,57	33,55	5,93
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	75,60	20,81	3,59	16,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	36,69	26,64	36,67	5,50
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	16,80	46,47	36,73	6,64
9. Jasa-jasa	35,59	7,16	57,25	9,86
PDB	40,55	15,22	44,24	100,00
PDB Non Migas	46,22	17,19	36,60	87,74

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Krisis ekonomi telah mengakibatkan jumlah unit usaha menyusut secara drastis (7,42%), dari 39,77 juta unit usaha pada tahun 1997 menjadi 36,82 juta unit usaha pada tahun 1998, dan bahkan usaha menengah dan besar mengalami penurunan jumlah unit usaha lebih dari 10%. Usaha menengah relatif yang paling lamban untuk pulih dari krisis ekonomi, padahal usaha menengah memiliki peran strategis untuk menjaga dinamika dan keseimbangan struktur perekonomian nasional dan penumbuhan kehidupan yang lebih demokratis.

Tabel 3.
Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000 dan 2003

No	Skala Usaha	Tahun 1997	Tahun 2000	Tahun 2003	Pertumbuhan 1997- 2003
1	Usaha Kecil	39.704.661	38.669.335	42.326.519	6,60%
2	Usaha Menengah	60.449	54.632	61.986	2,54%
3	Usaha Besar	2.097	1.973	2.243	6,96%
Jumlah		39.767.207	38.725.940	42.390.749	6,59%

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Usaha mikro, kecil dan menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Selama periode 2000 – 2003, usaha mikro dan kecil telah mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 7,4 juta orang dan usaha menengah mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 1,2 juta orang. Pada sisi lain, usaha besar hanya mampu memberikan lapangan kerja baru sebanyak 55.760 orang selama periode 2000 – 2003. Hal ini merupakan bukti bahwa UMKM merupakan katup pengaman, dinamisator dan stabilisator perekonomian Indonesia.

Tabel 4
Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (orang)

No	Skala Usaha	2000	2003	Pertumbuhan
1	Usaha Mikro dan Kecil	62.856.765 (88,79)	70.282.178 (88,43)	7.425.413 (11,81%)
2	Usaha Menengah	7.550.674 (10,67)	8.754.615 (11,02)	1.203.941 (15,94%)
3	Usaha Besar	382.438 (0,54)	438.198 (0,55)	55.760 (14,58%)
<i>Jumlah Tenaga Kerja</i>		70.789.877 (100)	79.474.991 (100)	8.685.114 (12,27%)

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Kontribusi UMKM pada ekspor non migas terus mengalami peningkatan secara perlahan, dari Rp 75.448 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp 75.859 milyar pada tahun 2003, sedang usaha besar mengalami penurunan dari Rp 314.518 milyar menjadi Rp 305.397 milyar pada periode yang sama. Pada sisi lain, usaha mikro dan kecil relatif rendah penggunaan bahan baku impornya (5,8%) jika dibandingkan dengan usaha menengah (9,3%) dan usaha besar (14,7%). Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif untuk neraca pembayaran Indonesia.

Tabel 5.
Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Skala Usaha
Pada Tahun 2000 dan 2003 (Milyar Rupiah)

No	Skala Usaha	2000	2003	Pertumbuhan
1	Usaha Mikro dan Kecil	21.136.510 (5,42)	20.464.869 (5,37)	- 671.641 (3,18)
2	Usaha Menengah	54.312.096 (13,93)	55.394.449 (14,53)	+ 1.082.353 (1,99)
3	Usaha Besar	314.518.682 (81,63)	305.397.028 (80,10)	- 9.121.654 (2,90)
<i>Jumlah Nilai Ekspor</i>		389.957.289 (100)	381.256.346 (100)	- 8.700.943 (2,23)

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi Usaha mikro dan kecil sebesar 4,1%, usaha menengah tumbuh sebesar 5,1%, sedang usaha besar hanya tumbuh 3,5%. Pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah telah meningkatkan kontribusi UMKM untuk pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2,37% dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,1%. UMKM memiliki keunggulan pertumbuhan PDB dalam sektor sekunder yang tumbuh masing-masing sebesar 5,60%, 4,65% dan 5,36% pada periode 2001 - 2003, sedang usaha besar hanya tumbuh sebesar 3,36%,

3,60% dan 4,04% pada periode yang sama. UMKM di sektor sekunder dan tersier relatif potensial dikembangkan pada mendatang mengingat memiliki pertumbuhan yang tinggi.

Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi.

Mempertimbangkan UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

ARGUMENTASI PERLUNYA PEMBANGUNAN UMKM DIPRIORITASKAN

Untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu, maka pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu memperoleh perhatian, mengingat:

- 1)** Pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Pada kondisi ekonomi Indonesia saat ini relatif akan sulit menarik investasi. Untuk itu, keterbatasan investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru, yang notabene adalah UKM, karena memiliki ICOR yang rendah dengan lag waktu yang singkat. Usaha Kecil pada tahun 2003 rata-rata hanya memerlukan investasi sebesar Rp 1,5 juta per unit usaha yang dapat menghasilkan PDB sebesar Rp 4,3 juta atas dasar harga konstan tahun 1993. Jika pemerintah mampu mengalokasikan dana yang memadai dan tepat sasaran untuk UMKM melalui Lembaga Keuangan yang ada, maka akan dapat mendorong lahirnya usaha mikro dan kecil sebanyak 6,67 juta orang dan mampu menghasilkan tambahan PDB sebesar 28,67 Triliun (ADH 1993) yang setara dengan 6,45% pertumbuhan ekonomi nasional. Misalkan usaha baru yang dilahirkan hanya separuhnya atau tingkat produktivitas wirausaha baru hanya separuhnya, maka tambahan pertumbuhan ekonomi akan berada dalam kisaran 3,2%, dengan asumsi wirausaha yang ada tetap mempertahankan produktivitasnya, maka pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan dapat dicapai pada kisaran $3,2\% + 4,1\% = 7,3\%$. Jika pembangunan ekonomi difokuskan pada sektor formal (usaha besar dan investasi asing) maka pertumbuhan ekonomi relatif sulit dicapai dalam waktu singkat, karena umumnya ICOR usaha besar memiliki lag waktu 2 – 3 tahun, yang artinya dampak pertumbuhannya baru terasa pada tahun 2007 – 2009 (Catatan: masyarakat Indonesia cenderung menginginkan hasil pembangunan yang lebih cepat dalam mengukur kinerja pemerintahan).
- 2)** UKM mampu menyerap 99,45% tenaga kerja di Indonesia. Berkembangnya wirausaha sebanyak 6,67 juta dalam lima tahun, dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja oleh usaha kecil sebesar 1,6 orang tenaga kerja per unit usaha, maka usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru bagi 10,67 juta orang. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran sebesar 5,1% (atau hanya 5,94 juta orang menganggur, yang berarti 110,6 juta orang bekerja dari perkiraan 116,516 juta angkatan kerja pada tahun 2009) akan dapat dicapai. Bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan pada angka 3,28% pada tahun 2009. Perhitungannya tahun lalu (2003) jumlah angkatan kerja di Indonesia 103.416 ribu orang, yang bekerja 92.057 ribu orang dan yang menganggur 11.359 ribu orang.

Dengan asumsi kemampuan penyerapan tenaga kerja yang ada hanya 2 juta per tahun yang berarti 10 juta dalam lima tahun ditambah 10,67 juta dari wirausaha baru, maka perkiraan jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2009 sekitar 112,7 juta orang yang berarti tingkat pengangguran dalam kisaran 3,28%.

- 3)** Produktivitas pembentukan PDB usaha mikro dan kecil per tenaga kerja atas dasar harga berlaku pada tahun 2003 sebesar Rp 10,45 juta per orang (USD 1.161, asumsi kurs USD= Rp 9.000) dengan laju pertumbuhan rata-rata dalam 4 tahun terakhir 9,35%, maka dalam pada tahun 2009 diperkirakan produktivitasnya sebesar Rp 17,87 juta per orang tenaga kerja atau setara dengan USD 1.787 (dengan asumsi sangat konservatif USD = Rp 10.000). Perlu diingat, ini terkait dengan 88,4% tenaga kerja di Indonesia. Peningkatan ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan per kapita dari kelompok mayoritas penduduk terbawah dari USD 431,6 menjadi USD 875,9 per kapita (Rasio TK : penduduk = 1 : 2,69 pada tahun 2003 menjadi 1: 2,04 pada tahun 2009). Pembangunan UKM akan membantu upaya meningkatkan pendapatan per kapita, dan sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga upaya menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 8,2% pada tahun 2009 dapat dicapai.
- 4)** Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro, karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor riil, karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi. Sektor UMKM j diharapkan akan menjadi tumpuan pengembangan sistem perbankan yang kuat dan sehat pada masa mendatang, mengingat non-performing loannya yang relatif sangat rendah. Pengembangan UMKM juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.
- 5)** Adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman dan damai; adil dan demokratis; serta sejahtera. Sulit mewujudkan keamanan yang sejati, jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi. Sulit mewujudkan demokrasi yang sejati, jika terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif masih sangat nyata. Pembangunan UMKM merupakan salah satu jawaban untuk mewujudkan visi Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis dan sejahtera.

PENDEKATAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UMKM

Pembangunan koperasi dan UMKM bersifat lintas sektoral, sehingga perspektif pembangunan koperasi dan UMKM perlu dimiliki oleh setiap anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan jajaran birokrasi di bawahnya. Kesulitan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia adalah rendahnya perspektif pembangunan koperasi dan UMKM yang dimiliki oleh jajaran birokrasi dan dunia usaha di Indonesia, serta adanya perspektif bahwa pembangunan koperasi dan UMKM merupakan urusan Kementerian Koperasi dan UKM.

Banyak departemen, kementerian dan institusi pemerintah lain serta dunia usaha yang belum memiliki perspektif pembangunan koperasi dan UKM secara benar. Hal ini diindikasikan oleh banyaknya persepsi yang keliru dari instansi lain, jika diminta informasi program pembangunan yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UMKM yang dilakukannya, maka umumnya hanya melaporkan perkembangan koperasi kerjanya. Selama ini, Deplu dan Perwakilan RI di luar negeri telah bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam berbagai forum kerjasama internasional dan pengembangan pasar bagi UMKM dari Indonesia di banyak negara.

Pembangunan Koperasi dan UMKM pada masa mendatang diharapkan tumbuh dari prakarsa masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dalam tatanan sistem ekonomi kerakyatan. Peran pemerintah akan difokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk menciptakan struktur pasar dan persaingan yang sehat sebagai lapangan bermain bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, serta mengoreksi ketidaksempurnaan mekanisme pasar dengan menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif, serta memberikan dukungan perkuatan bagi koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan sasaran pembangunan ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, maka Kementerian Koperasi dan UKM telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan RTJM di bidang koperasi dan UMKM untuk periode tahun 2005 – 2009, serta menyusun rencana strategis Kementerian Koperasi dan UKM. RPJM dan RTJM ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders dalam melaksanakan pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis.

Tujuan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia pada periode tahun 2005 – 2009 akan ditujukan kepada upaya sebagai berikut:

- 1)** Menumbuhkan 6 juta unit UKM baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi
- 2)** Meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM yang telah ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- 3) Mengembangkan lingkungan usaha yang kondusif bagi pengembangan KUMKM melalui penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan.
- 4) Memantapkan kelembagaan koperasi sesuai dengan jatidiri koperasi, sehingga pada akhir tahun 2009 akan terlahir koperasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- 5) Mengembangkan sinergi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan KUMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia, yaitu:

Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha Yang Kondusif

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM.

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.

Strategi Peningkatan Akses KUMKM Ke Sumberdaya Produktif

Rendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan sistem insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untuk mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapi KUMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya peningkatan akses KUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar, akses teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat besar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan sentra disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.

Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUMKM

Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada, pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi bersih.

Strategi Pemantapan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jatidiri Koperasi

Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu upaya menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada koperasi, dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. Strategi pemantapan kelembagaan koperasi diharapkan dapat menumbuh-kembangkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang baik kepada lebih dari 20 juta anggotanya.

Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri, melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan.

Strategi Peningkatan Sinergi dan Partisipasi Masyarakat

Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM; dan pengembangan kelembagaan UMKM.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Atas dasar argumentasi perlunya pembangunan UMKM tersebut maka Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan program prioritas, yang dijabarkan dalam enam strategi pengembangan KUMKM. Prioritas program tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemberdayaan UKM di seluruh Indonesia. Hanya saja disadari bahwa berbagai kesuksesan program tersebut, membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik oleh swasta, perguruan tinggi, dan pelaku usaha lainnya.

Daftar Acuan:

_____ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

_____ Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Kementerian Koperasi dan UKM. Draf Rencana Strategis Pembangunan Koperasi dan UMKM Periode Tahun 2005 – 2009. Jakarta, 2004.

Kementerian Koperasi dan UKM. Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2001 – 2004. Jakarta, 2004

Kementerian Koperasi dan UKM. Draf Rencana Program Kementerian Koperasi dan UKM Periode Tahun 2005 – 2009. Jakarta, 2004

Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS. Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah,dan Ekspor Usaha Kecil dan Menengah, serta Peranannya terhadap Tenaga Kerja Nasional, PDB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan. Jakarta, 2003